

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	INVESTOR	12	12-8-2002

Divestasi Saham KPC Bakal Berbuntut di PTUN

Pemprov Kaltim Nilai Pemerintah Ingkar Janji

- Pekan Ini Mengadu ke Presiden
- Penawaran Saham KPC Jalan Terus

Jakarta, Investor

Tak puas dengan keputusan pemerintah pusat soal divestasi PT Kaltim Prima Coal (KPC), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengadu kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. Jika hasilnya tidak memuaskan, mereka berniat melayangkan kembali gugatan kepada pemerintah dan KPC di PTUN secara Perdata.

"Minggu depan, (pekan ini, red) kami berencana bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri. Kalau pertemuan itu tidak memuaskan Kaltim, barulah gugatan itu dilakukan," ungkap Syaiful Teteng, Sekretaris Pemprov Kaltim, akhir pekan lalu.

Menurut Teteng, Pemerintah Pusat telah ingkar janji dalam masalah divestasi saham 51 persen KPC. Dia menjelaskan, obyek yang menjadi dasar gugatan adalah surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 2583/80/MEM.S/2002 tanggal 1 Juli 2002 yang menyatakan 51 persen saham KPC yang hendak dilepas dibagi dua, yaitu 31 persen untuk Pe-

merintah Kaltim dan Pemkab Kutai Timur, sedang 20 persen lagi untuk pemerintah pusat.

Keputusan ini, jelas Teteng, telah mengingkari kebijakan yang dibuat sebelumnya, dimana pemerintah pusat pernah menyatakan tidak berminat membeli 51 persen saham KPC, dan menyerahkannya kepada Pemprov Kaltim.

KPC Digugat Lagi

Selain kepada pemerintah pusat, sambungnya, Pemprov Kaltim juga bermaksud akan menggugat KPC secara perdata. Mengenai latar belakang rencana Pemprov Kaltim mengajukan gugatan, Teteng menjelaskan, hal tersebut telah diputuskan dalam rapat Musyawarah Pimpinan Daerah Kaltim yang dipimpin oleh Gubernur Suwarna AF dan dihadiri pula oleh pimpinan DPRD Kaltim.

Pada kesempatan terpisah, Setditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral, Sukhyar menyatakan, proses penawaran saham KPC dapat terus berjalan, meski ada penolakan dari daerah. "Ini sudah merupakan keputusan ne-

gara, tak bisa lagi ditunda-tunda. Kalau keputusan ini tak dihormati, siapa lagi yang akan dipatuhi. Gubernur kan wakil Presiden di daerah," katanya.

Seperti diketahui, keputusan pemerintah soal divestasi KPC, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, telah diputuskan dalam Rapat Kabinet Terbatas yang dihadiri oleh Presiden, Wapres, tiga Menko, Menteri ESDM, Mendagri, Panglima TNI dan Kapolri, pada Selasa malam (30/7) lalu di Istana Merdeka, Jakarta.

Sukhyar sendiri tak yakin ngototnya Pemprov Kaltim ingin menguasai 51 persen semata-mata untuk kepentingan masyarakat. "Jangan-jangan, masyarakat hanya dijadikan alasan saja. Padahal yang sebenarnya untuk kepentingan sekelompok orang saja." Ujarnya.

Kecurigaan tersebut ber-alasan mengingat menurut kabar yang beredar, "investor" yang mem-backup permodalan Pemda untuk membeli saham KPC merasa keberatan jika hanya memiliki saham 31 persen saja, sehingga investor tersebut kemungkinan akan mengundurkan diri jika jumlah saham yang diinginkan yaitu 51 per-

sentidak diperoleh. Hal tersebut yang membuat Pemda ngotot untuk mendapatkan jumlah saham yang diinginkan investor tersebut.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), PL Coutrier mengatakan, keputusan yang telah diambil pemerintah itu harus dipertahankan demi menjaga wibawa pemerintah. Jika pemerintah tak bisa mempertahankan keputusannya, justru akan menimbulkan pertanyaan baru dari investor khususnya asing, mengenai pihak mana yang lebih berkuasa di negara ini, Pemda ataukah Pusat.

"Yang sudah diputuskan harus dijaga. Kalau tidak, investor asing tentu akan enggan melakukan investasinya di sini, karena mereka akan mempertanyakan kewibawaan pemerintah," katanya.

Lebih jauh, Coutrier berharap, pemerintah dapat mencegah terjadinya gangguan produksi yang rencananya akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat Kaltim. Kalau pemerintah tak dapat menjamin kelancaran produksi, hal ini kata Coutrier kembali akan berakibat kepada menurunnya kepercayaan investor terhadap pemerintah. (c21)